

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah menjadi topik pembicaraan bagi para pemimpin dunia. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, masalah ini dibahas dalam Majelis Umum yang diadakan di New York pada 25 September 2015, sekurang-kurangnya 193 kepala negara dari Amerika Serikat yang hadir, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga mendukung dan menyetujui *Sustainable Development Goals* Indonesia. Mulai Tahun 2016 telah disepakati dan diberlakukan selama 15 tahun yaitu tahun 2015 hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari seperangkat tujuan transformatif yang disepakati yang berlaku untuk semua negara tanpa kecuali. Implementasi tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Penyebaran TPB yang luas menawarkan perspektif baru tentang definisi "pembangunan" yang universal, yang melibatkan negara maju dan negara berkembang (Bappenas,2017).

Agenda ini mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan hal-hal nyata untuk menciptakan masa depan dan prinsip yang lebih baik di semua aspek kehidupan. Di antara 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu prioritas kajian ini pada urutan kelima ialah yang isinya “**Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan**”.

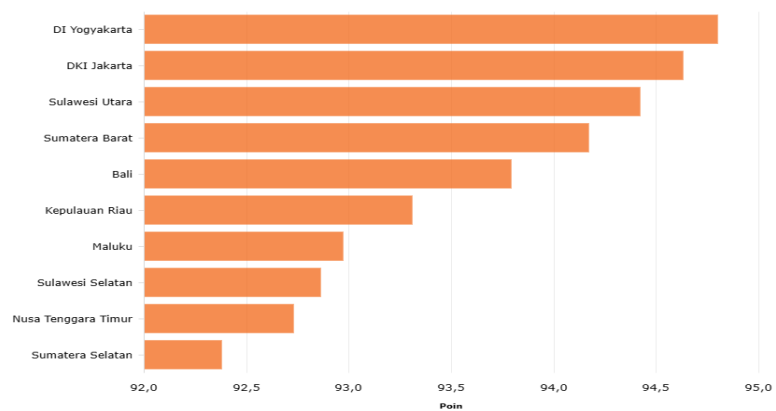
TPB bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin kewenangan yang sama bagi perempuan di semua lapisan masyarakat. Dalam Indeks Pembangunan Gender (2020), Indonesia menempati urutan ke-107 dari 180 negara dalam bidang pendidikan diukur dengan dua indikator ialah rata-rata tahun sekolah yang diselesaikan dan harapan lama sekolah. Kemudian dinilai oleh angka harapan hidup di sektor kesehatan dan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja di sektor ketenagakerjaan. Meski jumlahnya meningkat setiap tahun Indonesia masih berada di kelompok 50% kebawah.

Prinsip esensial kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah lama didukung oleh semua pihak. Banyak transformasi yang dialami perempuan dan kelompok marginal lainnya sepanjang waktu adalah bukti kemajuan yang dibuat untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, ketimpangan gender masih menjadi masalah di berbagai bidang pembangunan. Pemerintah Indonesia, menyelusuri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak berkomitmen mendukung kesetaraan gender pada tahun 2030, sejalan dengan komitmen internasional kesetaraan 50:50. Oleh karena itu, Departemen PP dan PA merencanakan program utama *Three Ends* pada tahun 2016, yang mencakup: 1) Mengakhiri kekerasan terhadap orang dewasa dan anak-anak 2) Meniadakan perdagangan manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak 3) Menghentikan ketidakadilan akses perempuan terhadap ekonomi. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong daya saing, kemandirian, dan ketahanan masyarakat Indonesia pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa hingga saat ini,

perbedaan dalam pencapaian pembangunan gender tetap ada. Bidang ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan negara semuanya terkena dampak negatif oleh kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu tolok ukur gabungan yang digunakan untuk menilai perkembangan manusia, terutama dari perspektif gender. IPG mengukur kesetaraan pembangunan antara pria dan wanita dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Angka 100 merupakan standar dalam interpretasi GPI sebab 100 merupakan rasio perbandingan paling lengkap. Apabila perbedaan analisis antara GPI dan nilai 100 semakin kecil, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin seimbang atau proposional. Namun, jika kesenjangan antara nilai GPI dan 100 semakin besar, maka perbedaan dalam pencapaian perkembangan antara perempuan dan laki-laki juga semakin besar. IPG Indonesia masih 92,74, yang lebih rendah dari rata-rata dunia. Namun, pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut BPS menyatakan bahwa pengumpulan data rasio jenis kelamin adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis gender. Perempuan akan berkontribusi lebih baik ketika jumlah perempuan lebih tinggi dalam pembangunan maka akan semakin meningkatkan nilai IPG. BPS juga melaporkan IPG DIY pada tahun 2020 sebesar 94,80 poin. Provinsi Yogyakarta memiliki IPG tertinggi, lalu diikuti provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Rahmawati dan Hidayah 2020). Menurut laporan, angka ini adalah yang tertinggi dari semua provinsi di Indonesia.



Gambar 1. 1 Provinsi Indeks Pembangunan Gender Tertinggi (2020)

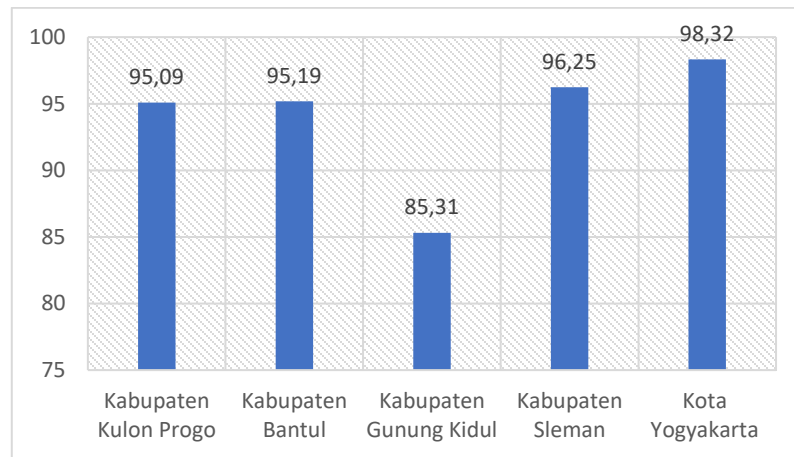
Sumber : BPS

Berdasarkan Gambar 1.1 pencapaian IPG di DIY menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kesenjangan pembangunan manusia terkecil atau hampir setara dibandingkan provinsi lainnya. Selain itu, IPG yang tinggi tersebut juga digunakan untuk menggambarkan usaha dan upaya pemerintah daerah dalam mencapai kesetaraan gender di Provinsi DIY (KPPA,2019).

Indeks Pembangunan Gender tidak memiliki nilai yang konsisten di seluruh provinsi di Indonesia atau selama setahun. Hal ini terbukti di provinsi DIY terdiri dari 1 yaitu Kota Yogyakarta dan 4 Kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Kondisi geomorfologi tiap kabupaten/kota berdampak pada iklim sosial dan ekonomi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, faktor sosial termasuk kesehatan dan pendidikan, serta ekonomi, memiliki dampak signifikan terhadap seberapa baik kinerja Indeks Pembangunan Gender.

Erlina Hidayati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Balita dan Pengelola Penduduk (DP3AP2) Yogyakarta, mengatakan konsekuensi IPG Yogyakarta menunjukkan bahwa kesenjangan perbaikan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi paling kecil dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini dibuktikan melalui terkait dengan catatan yang diperoleh dari BPS untuk IPG tahun 2020, yaitu 94,80 poin. Ini adalah angka terbaik di antara provinsi lain yang diperoleh dari Indeks Peningkatan Manusia (IPM), khususnya perempuan dengan 78,46 poin dan laki-laki dengan 82,76 poin

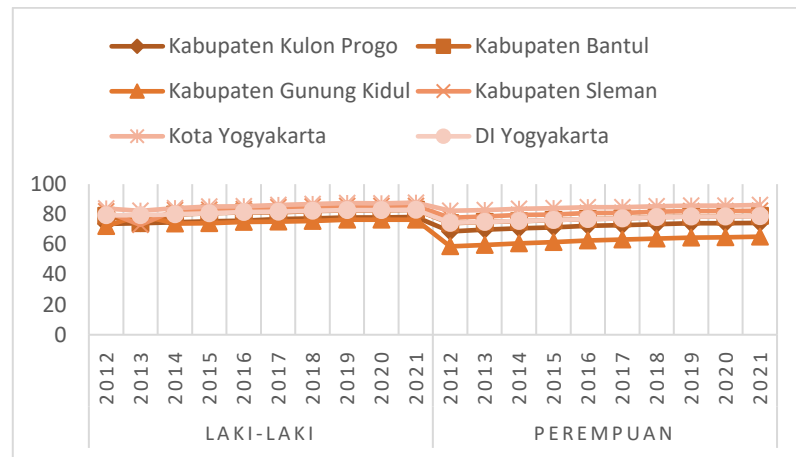
Akan tetapi, masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dan terbukti dalam segala bentuknya. Hal tersebut berarti bahwa masih belum meratanya distribusi IPG di kabupaten/kota DIY. Meskipun Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki IPK tinggi, namun kabupaten lain masih memiliki peringkat rendah, seperti Kabupaten Gunung Kidul yang masih memiliki peringkat IPG rendah. Pada saat yang sama, persoalan rendahnya keterwakilan politik perempuan di parlemen DIY masih sering ditemui. Ibu Erlina mencontohkan, kontribusi perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota hanya mencapai 20%.



Gambar 1. 2 Gender Development Indeks (GDI) Tahun 2021 (persen)

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Indeks Gender di DIY bermula tahun 2021 berurutan tertinggi terjadi pada Kota Yogyakarta dan IPG terendah yaitu Kabupaten Gunung Kidul sebesar 85,31. Besarnya IPG di tiap-tiap kabupaten/kota dipengaruhi oleh indikator dari indeks tersebut. Meskipun IPG Gunung Kidul terdapat peningkatan namun masih terhitung rendah. Diakuiinya, untuk meningkatkan IPG, Pemkab gunungkidul kendala pada sektor pendidikan dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan juga tercermin mulai tingkat pendidikan penduduk berusia 15 tahun ke atas. HLS seharusnya ditempuh 12 tahun, tetapi nyatanya RLS untuk usia 25 tahun hanya sekitar tujuh tahun. Jumlah IPG yang tinggi menunjukkan kesetaraan gender yang cukup baik di wilayah tersebut, tetapi ini tidak selalu menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang tinggi. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun hasil IPG DIY relatif baik, namun masih terdapat ketidaksetaraan yang signifikan pada setiap komponen dan kabupatennya.



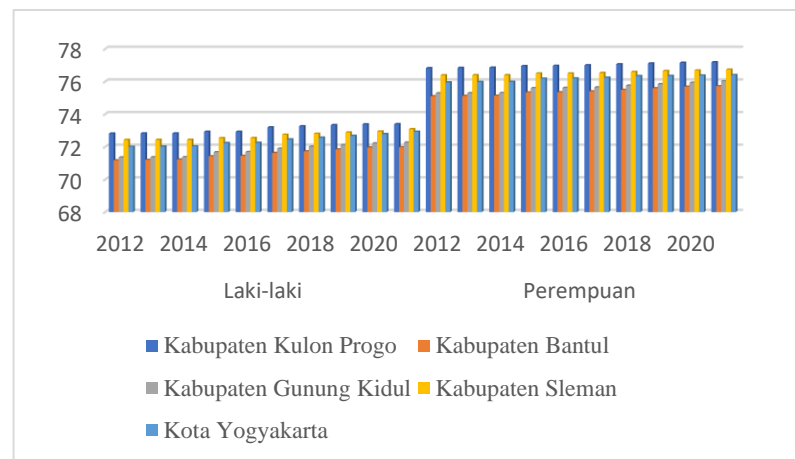
Gambar 1. 3 IPG, IPM Laki-laki dan IPM Perempuan di Provinsi DI Yogyakarta 2012-2021 (persen)

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

IPG dan IPM masing-masing gender di provinsi DIY meningkat di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Meskipun begitu, terdapat perbedaan nilai antara IPM, di mana nilai IPM untuk laki-laki cenderung lebih tinggi daripada pada perempuan. Hal ini menunjukkan adanya isu ketimpangan dalam pembangunan gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Faktor utama dalam mengevaluasi pembangunan manusia dalam kesehatan adalah umur panjang dan sehat karena dengan tingkat kesehatan yang baik maka kemampuan dan kualitasnya akan lebih baik, sedangkan jika kesehatannya buruk maka kemampuan dan kualitasnya akan menjadi buruk. Nilai Angka Harapan DIY lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Nasional, menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran pemerintah khususnya di bidang kesehatan telah berhasil. Upaya salah satunya dengan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka kematian tahunan. Indikator ini menunjukkan

Angka Harapan Hidup (AHH) seluruh populasi. Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, terbukti bahwa rata-rata harapan hidup perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki.



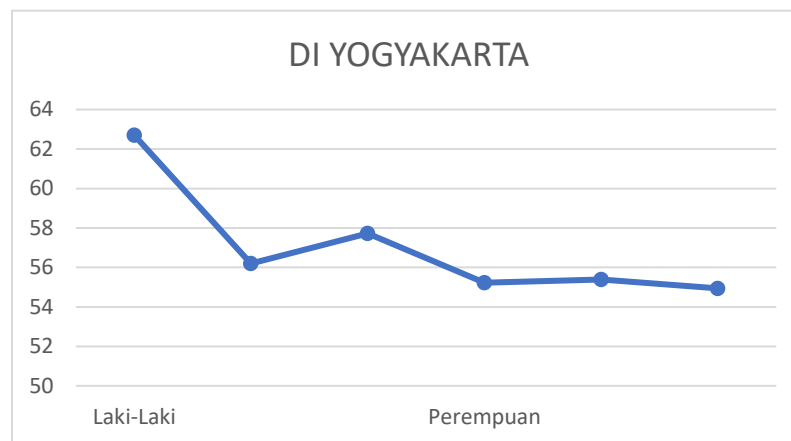
Gambar 1. 4 *Life expectancy* Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (persen)

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Angka diatas menyatakan dalam sepuluh tahun terakhir pada tahun 2012 hingga tahun 2021. Walaupun nilai penambahannya tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Hasil perhitungan secara keseluruhan menunjukkan bahwa cenderung memiliki angka harapan hidup rata-rata yang lebih tinggi. Akibatnya, program dan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan usia harus dipertimbangkan ketika AHH meningkat. Selain itu peningkatan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tambunan (2016) menyatakan bahwa untuk meningkatkan inklusivitas dalam sektor kesehatan, perlu diimplementasikan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pendidikan dan

peningkatan pengetahuan di bidang kesehatan, seperti mengadakan kampanye tentang hidup bersih dan gizi seimbang.

Selain faktor genetik, terdapat faktor lain yang mempengaruhi AHH pada perempuan yang penting dianggap adalah faktor kesehatan. Gambar 1.4 akan menunjukkan bahwa dalam sebulan terakhir lebih banyak perempuan daripada laki-laki akan mengalami masalah kesehatan dan mencari pengobatan rawat jalan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih peduli dengan kesehatan dan lebih menyadari hal itu dibandingkan laki-laki.



Gambar 1. 5 Persentase Penduduk di Perkotaan yang Mengalami Masalah Kesehatan dan Melakukan Pengobatan Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Persen)

Sumber: BPS RI – Susenas

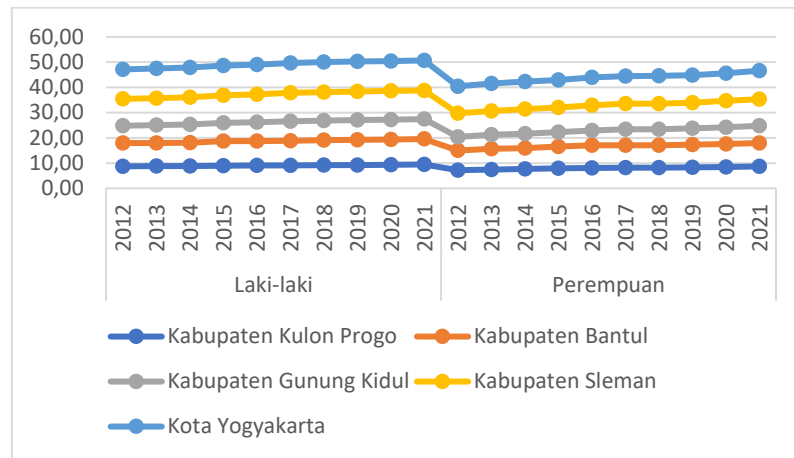
Struktur gender bisa menjadi aspek penting bahwa laki-laki lebih kecil dibanding AHH perempuan. Harapan hidup laki-laki mungkin lebih rendah sebab kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, begadang, tidak menjalankan pola hidup bersih dan sehat serta kurangnya aktivitas fisik. Konstruksi gender memberi

perempuan peluang untuk berperilaku yang lebih sehat, seperti belajar tentang gizi keluarga juga memahami pentingnya makan sayur dan buah. Budaya yang mendorong perempuan untuk tampil lebih cantik telah menyebabkan meningkatnya perhatian terhadap gaya hidup yang lebih bersih dan sehat. Dengan demikian, perempuan lebih sehat daripada laki-laki dan memiliki jangka hidup yang lebih lama.

Remaja laki-laki mempunyai situasi yang berbeda misalnya pertikaian yang tidak disengaja, kekerasan fisik antarpribadi, alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan bunuh diri adalah penyebab kematian yang lebih tinggi, serta kematian akibat minuman keras dan merokok. (Elissa Kennedy, Gerda Binder, Karen HumphriesWaa, Tom Tidhar, Karly Cini, Liz Comrie-Thomson, Cathy Vaughan, Kate Francis, dan Nisaa Wulan, George Patton, 2020).

Pembangunan Manusia khususnya gender, tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan tanpa pendidikan pembangunan manusia menjadi langka itu bisa terjadi. Indikator rata-rata lama sekolah dapat dipergunakan dalam mengukur hasil Indeks Pembangunan Gender. Angka ini menunjukkan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan pendidikan. Untuk mengetahuinya dihitung dari berapa tahun seseorang tersebut mengenyam pendidikan formal. Jumlah seseorang yang diperhitungkan dalam pengukuran RLS dimulai dengan jumlah penduduk yang berusia 25 tahun keatas dengan syarat telah menamatkan pendidikan formal pada umur tersebut. Menurut BPS (2020), lama pendidikan dihitung selama durasi belajar untuk sekolah dasar adalah enam tahun, sedangkan untuk SMP adalah tiga tahun, dan untuk SMA juga tiga tahun, atau total dua belas tahun untuk mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini tidak mempertimbangkan apakah seseorang

pernah tinggal di kelas atau tidak. Selain itu, penilaian dilakukan terhadap individu yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di tingkat diploma, sarjana, magister, atau doktoral.



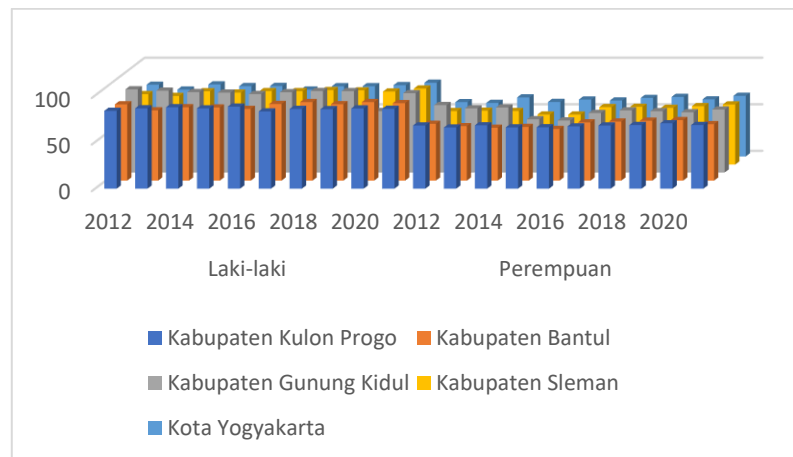
Gambar 1. 6 Average length of schooling Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (persen)

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Periode bahwa waktu 2012 sampai dengan 2021 tetap ada disparitas dalam sektor pendidikan, dengan tingkat keterlibatan perempuan memiliki tingkat kecenderungan yang lebih rendah daripada laki-laki. Maka, peningkatan RLS perempuan perlu dilakukan, karena untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan. Dalam publikasinya yang berjudul Laporan "Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020" diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan lama sekolah perempuan.

Ketidaksetaraan dalam bidang ketenagakerjaan sering kali terjadi. Perbedaan dalam waktu yang dihabiskan Di lingkungan rumah tangga, terdapat perbedaan dalam

pendidikan dan kemampuan, hambatan sosial-budaya, berbagai sektor pekerjaan, perpindahan laki-laki, dan kesempatan akses terhadap sarana produksi berperan dalam kontribusi fenomena ini (Mehrotra & Sinha, 2017). Ketimpangan tercemin kenyataan para pekerja perempuan umumnya mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan para pekerja laki-laki (Ari, 2017).



Gambar 1. 7 Labor Force Participation Rate Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (persen)

Sumber : BPS, 2022 (data diolah)

Kontras dalam Angka Angkatan Kerja kedua gender Provinsi DIY tahun 2021 ialah 64,59:82,83. Data mengungkapkan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Ini bertentangan dengan rasio Jenis Kelamin 98,22, di mana jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki (BPS,2021). Menurut penelitian yang telah dilakukan di banyak negara yang sedang berkembang, kesenjangan dalam Tingkat Pendidikan dan Keterampilan (TPAK) antara laki-laki dan perempuan merupakan fenomena yang ada di mana-mana (Verick, 2018).

Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia adalah adanya tradisi dan norma yang masih kuat di mayoritas masyarakat yang menganggap peran tradisional lebih utama daripada peran transisi. Perempuan cenderung tinggal di rumah dan memiliki rasa tanggung jawab keluarga, perempuan lebih enggan untuk bekerja. Perempuan memiliki kemampuan untuk mengembangkan peran tradisional, termasuk sebagai pasangan, orang tua, dan pengelola rumah tangga serta berperan dalam peran transisi lainnya seperti pekerja, anggota masyarakat dan pelaku pembangunan (Dwi, 2017).

Oleh karena itu, perhatian khusus sangat diperlukan dalam keberhasilan pencapaian kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Peningkatan kesetaraan gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh keselarasan antara pria dan wanita dalam segala aspek atau sektor. Pemerintah kota harus secara aktif mengambil bagian dalam mendukung inisiatif nasional yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender untuk memajukan kesetaraan gender.

Hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis data panel oleh Lukiswati et al. (2020) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang berkontribusi pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Partisipasi Sekolah SD/Sederajat serta Angka Partisipasi Sekolah SMA/Sederajat. Penelitian ini memanfaatkan analisis data panel regresi untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan nilai IPG perempuan,

dengan hasil menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai IPG perempuan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dan beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Indeks Pembangunan Gender Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGS) Tahun 2012-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada argumentasi permasalahan yang telah dijelaskan, dapat ditinjau bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) ialah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dari menganalisis masalah tersebut maka munculah pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh angka harapan hidup terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2021.

1.4 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini memperhatikan keterbatasan data dengan fokus pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi DIY selama periode 10 tahun, dari tahun 2012 hingga 2021, yaitu Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
2. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menentukan pengaruhnya adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG).

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang bermanfaat untuk penulis dan pihak lain, termasuk yang berikut:

1. Bagi penulis, persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman dan bentuk implementasi analisis teoritis dipelajari selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi melalui pelaksanaannya dengan permasalahan ekonomi yang nyata.
2. Bagi instansi, instansi swasta ataupun pemerintah sebagai penerima Informasi yang berguna diharapkan untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam lakukan perbaikan untuk memecahkan masalah ketidaksetaraan gender.
3. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan acuan untuk melakukan penelitian sejenis, sebagai pembanding dan pelengkap penelitian pada pihak tersebut.
4. Bagi masyarakat, Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, diketahui oleh masyarakat umum dan informasi mengenai ketidaksetaraan gender berdasarkan indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki dapat berpengaruh bagi masyarakat dan peminat topik serupa.